

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan temuan data hasil dari observasi di lapangan yang telah disajikan dan dianalisis serta diinterpretasikan, maka dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang. Selain itu agar penelitian dapat lebih bermanfaat, maka peneliti akan memberikan rekomendasi berbagai saran agar nantinya dapat menjadi masukan dalam perbaikan kebijakan dan memunculkan inovasi-inovasi baru dalam memaksimalkan kinerja pengendalian kelebihan muatan angkutan barang.

IV.1 Kesimpulan

Dari wawancara dan observasi penelitian di lapangan tentang penelitian evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum dilaksanakan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan fasilitas pendukung penimbangan yang belum terialisasikan semuanya, pengoperasian alat timbang yang belum

sesuai dengan prosedur, penyelenggaraan sanksi yang belum diimplementasikan semuanya dan keterlambatan pemberian uang intensif kepada petugas jaga. Kesimpulan tersebut diperinci dengan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut.

1. Efektivitas

Penyelenggaraan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang masih belum tercapai. Kemudian untuk penyelenggaraan sanksi juga belum maksimal, yaitu dengan semakin naiknya jumlah pelanggaran kelebihan muatan. Sedangkan untuk pemberian uang insentif kepada petugas juga masih memenuhi penundaan dan belum dilaksanakan secara maksimal. Namun untuk pengoperasian jembatan timbang sudah efektif dengan SIMP.

2. Efisiensi

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas pendukung penimbangan dilihat dari maksud dan fungsi dapat dikatakan efisien. Pengadaan fasilitas pendukung tersebut dapat memaksimalkan kinerja jembatan timbang. Pengoperasian alat timbang dengan berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Terpadu dinilai sangat efisien, dengan system tersebut semua data akan terkoneksi secara langsung di seluruh Jembatan Timbang Provinsi Jawa Timur dan server pusat. Sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu dalam melakukan pengawasan. Usaha dalam menjalin kerja sama dengan berbagai instansi lainya juga

belum efisien, hal itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang di Jembatan Timbang Mojoagung.

3. Kecukupan

Dalam penyelenggaraan alat penimbang dan fasilitas pendukung dinilai sudah dapat memecahkan isu dalam masyarakat, karena dapat meminimalisir kecurangan dalam pengoperasian jembatan timbang yang berimbas pada pelaksanaan penimbangan yang lebih transparan. Tata cara pengoperasian penimbangan juga dapat dinilai cukup baik dengan pengetatan peraturan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. Sementara itu penyelenggaraan sanksi hasil yang diinginkan belum tercapai, karena jumlah pelanggaran cenderung meningkat. Pemberian uang insentif kepada petugas di lapangan dapat dikatakan cukup baik dalam memecahkan isu di masyarakat mengingat jembatan timbang rawan praktek pungutan liar.

4. Perataan

Biaya manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Seperti penyelenggaraan alat penimbangan dan fasilitas pendukung yang belum teralisasi, tidak selalu diperiksa buku uji kendaraan dan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut serta tertundanya uang insentif petugas.

5. Responsivitas

Pelaksanaan penyelenggaraan alat penimbangan dan fasilitas pendukung alat timbang direspon baik oleh pengguna kendaraan angkutan barang. Dengan adanya fasilitas pendukung seperti layar monitor informasi berat kendaraan membuat sopir mengetahui berat kendaraannya. Respon negatif muncul dari petugas kepolisian tentang belum terselenggaranya fasilitas pendukung, seperti tempat parkir dan tempat penurunan barang, karena menyulitkan petugas kepolisian dalam pelaksanaan kebijakan pengembalian kendaraan ketempat asal. Sementara itu respon negatif banyak muncul di dalam penyelenggaraan sanksi khususnya pelanggaran kelebihan muatan di atas 25% JBI. Para sopir merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut yang akhirnya membuat buku KIR baru daripada menghadiri sidang.

Kejadian tersebut langsung ditanggapi oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dengan mengeluarkan kebijakan untuk pembuatan buku KIR baru harus mendapatkan rekomendasi dari pusat. Selain itu pelanggar juga ada yang berusaha untuk menyuap petugas agar mendapat keringanan hukuman pelanggaran. Namun petugas berusaha menolak tawaran tersebut dengan memberikan penjelasan tentang hukum.

6. Ketepatan

Kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dinilai kurang tepat dalam menyelesaikan isu-isu permasalahan yang ada di

masyarakat. Semakin tingginya jumlah pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, masih tingginya angka kecelakaan yang diakibatkan kendaraan angkutan barang serta masih banyaknya jalan rusak di sepanjang jalan raya Jombang-Surabaya.

IV. 2 Saran

Pelaksanaan kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur masih perlu perbaikan dan melakukan berbagai inovasi agar kedepannya pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dapat maksimal, maka dari itu berdasarkan temuan di lapangan, peneliti memberikan beberapa saran kepada pemerintah terkait.

1. Saran ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan provinsi Jawa Timur untuk menganggarkan penurunan barang, gudang barang dan tempat peristirahatan sopir
2. Membuat dua pos jaga untuk pengecekan dokumen kendaraan dan penimbangan kendaraan.
3. Mengintegrasikan pembuatan buku uji dan mengkaji ulang biaya pembuatan buku uji.
4. Memperbaiki sistem manajemen penggajian petugas, yaitu dengan menganggarkan gaji petugas dalam APBD.

5. Mengkaji ulang tentang pembatasan wewenang petugas jembatan timbang dengan memberikan wewenang khusus penyidikan dan penyelidikan kendaraan angkutan barang.
6. Mengkaji ulang tentang sanksi tilang yang harus menghadiri sidang di Pengadilan Negeri tempat kejadian perkara dan membuat peraturan khusus tentang pengalihan sidang pelanggaran.
7. Membuat sistem denda progresif 20% bagi pelanggar 2 kali.
8. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di media sosial maupun reklame.

IV.3 Implikasi

Dalam penelitian ini terdapat 2 lingkup implikasi yang akan diuraikan oleh peneliti, yaitu implikasi akademik dan implikasi praktis. Implikasi akademik merupakan implikasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian kepada suatu keilmuan. Disiplin ilmu tersebut adalah ilmu administrasi negara yang mana berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. Sedangkan implikasi praktis merupakan implikasi yang dapat memberikan informasi dari hasil penelitian untuk dilakukan oleh para praktisi.

IV.3.1 Implikasi akademik

Implikasi akademik dalam penelitian dapat memberikan suatu kontribusi dalam disiplin ilmu administrasi yang berkaitan dengan suatu kebijakan publik khususnya evaluasi implementasi suatu kebijakan. Dengan menggunakan alat analisis kriteria-kriteria evaluasi kebijakan dari William N. Dunn penelitian ini memberikan sebuah analisis teori tentang berbagai permasalahan yang menyangkut kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang. Analisis teori tersebut berupa suatu analisis dan penjelasan tentang capaian-capaian atau bahkan sebuah kegagalan dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan ditelaah dari kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, pemerataan, dan ketepatan.

Dari data permasalahan awal yang terdapat di Jembatan Timbang Mojoagung, maka kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang perlu dilakukan sebuah evaluasi untuk menemukan akar permasalahan yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn yang nantinya akan memunculkan berbagai rekomendasi-rekomendasi dari

hasil penelitian dan dapat menjadi suatu pertimbangan untuk pembuatan inovasi-inovasi kebijakan dalam menjawab permasalahan di lapangan. Dalam evaluasi kebijakan ini ditemukan bahwa kebijakan ini sudah dilakukan dengan baik secara prosedural, adapun kekurangan-kekurangan di lapangan yang dilihat dari alat analisis teori tersebut diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur dan dana serta budaya di lingkungan jembatan timbang yang buruk. Dengan penggunaan berbagai alat analisis teori untuk menjelaskan suatu fenomena di lapangan, penelitian ini mampu memberikan sumbangan akademis yang strategis bagi perkembangan disiplin ilmu administrasi negara khususnya mengenai studi evaluasi implementasi kebijakan publik.

IV.3.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini menghasilkan gambaran tentang proses pelaksanaan kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan disertai alat analisis teori kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang khususnya Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Informasi tersebut dapat menjadi sebuah masukan untuk menyempurnakan kebijakan dengan adanya pembuatan berbagai inovasi-inovasi dalam merespon kelemahan-kelemahan dari kebijakan sebelumnya.